



DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUN 2022

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI MALUKU**

**RENCANA KERJA TAHUN 2022 DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI MALUKU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi: berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;

10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku didasarkan pada kerangka regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku

14. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku
15. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan

1.4. Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja

3.2 Program dan Kegiatan

Bab III PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Kondisi Umum OPD

2.1.1. Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku, sehingga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah mengalami perubahan Nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan susunan organisasi terdiri dari :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat membawahkan :
 - a. Subag Kepegawaian dan Umum
 - b. Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Subag Keuangan dan Aset
- C. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan membawahkan :
 - a. Seksi Penataan, Administrasi Pemerintahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa.
 - b. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- D. Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa membawahkan :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas.
- E. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar.
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi, SDA, TTG dan Pembangunan Sarana Parasarana Desa
- F. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Ekonomi, SDA, dan Pembangunan Sarana Parasarana Kawasan Perdesaan
 - b. Seksi Pembangunan Sarana Prasana Kawasan Perdesaan

Sesuai Paragraf 2 pasal 24 dan Paragraf 3 Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tersebut ditetapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan fungsi :

- a. Perumusan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai Rencana Strategis Daerah / RPJMD
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- c. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- d. Pembinaan Teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Pelaksanaan Ketatausahaan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku hingga Desember 2020 berjumlah 35 personil, dengan komposisi sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon

- Kepala Badan /II A : 1 orang
- Sekretaris/IIIA : 1 orang
- Kepala Bidang/IIIA : 5 orang
- Kepala Sub Bidang/IVA : 7 orang
- Kepala Sub Bagian/IVA : 3 orang
- Staf : 19 orang
- Tenaga Kontrak : 24 orang

2) Menurut Tingkat Pendidikan :

- S 2 : 13 orang
- S 1 : 17 orang
- D 3 /Sarjana Muda : - orang
- SLTA : 5 orang
- SMP : - orang
- SD : - orang

3) Menurut Golongan/Ruang

- Golongan IV/d : 1 orang
- Golongan IV/b : 2 orang
- Golongan IV/A : 7 orang
- Golongan III/d : 5 orang
- Golongan III/c : 6 orang
- Golongan III/b : 10 orang
- Golongan III/a : 2 orang
- Golongan II/d : 1 orang
- Golongan II/c : 1 orang
- Golongan II/b : - orang
- Golongan II/a : - orang
- Tenaga kontrak : 24 orang

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Tahun 2020

Alokasi anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 sebesar Rp.4.780.828.850,- dengan realisasi keuangan Rp.4.426.729.724,- atau 92,59%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.354.099.126,-. Anggaran ini direalisasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administarsi Perkantoran

Tujuan dari program ini adalah terwujudnya kelancaran jasa administrasi perkantoran pada unit kerja, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%, Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya Jasa surat menyurat berupa : 300 lembar meterai 6000 dan 80 lembar meterai 3000.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran.

- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.53.076.138,- atau 53,08% sehingga sisa anggaran sebesar Rp.46.923.862,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 12 bulan.
Hasil (Outcome) :
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.9.750.000,- atau 97,50%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.250.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya 2 unit sarana mobilitas darat roda empat untuk pengangkutan barang.
Hasil (Outcome) :
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.72.342.000,- dengan realisasi keuangan Rp.71.091.600,- atau 98,27%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.250.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya 2 orang cleaning service serta peralatan kebersihan berupa : sapu, keranjang sampah, kain pel lantai + tongkat, kain pel, bayfresh, tissue basah, clean pembersih lantai, klean pembersih kaca, tisu kering, kain panel, catok sampah dan sabun sunlight, pengharum ruangan, pengharum udara, kit pembersih, kain lap mobil, pengharum udara mobil.
Hasil (Outcome) :
Kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkantoran.
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya alat tulis kantor berupa : Kertas HVS, Kertas Bergaris, Kertas Faximile, Kertas Komputer, Amplop Coklat, Paper Klip, Binder Clip, Staples, Isi Staples, Lem, Map Biasa, Map Batik, Map Plastik, Map Kantona, Map Odner, Pelvalator, Pita Daiti Mesin Tik, Pita Computer Kertas Karbon Daito, Tinta Cap, Bolpoint Pilot, Pena Faster, Spidol Board Marker, Penghapus White Board, Tinta Printer, Catridge, Type-Ex, Spidol White Board, Buku Kas Folio, Buku Ekspedisi, Buku Agenda, Buku Kwitansi, Kertas Pos-It, Mistar, Tinta Cap Broadcast dan Gunting Sedang, Pisau Cutter Besar, Box File, Kertas Pos It Besar, Buku Agenda Keluar, Buku Agenda Masuk, Buku Agenda Sedang Polos, Buku Agenda Besar Polos, Catridge Canon Hitam 745, Catridge Canon warna 746, Catridge Canon Hitam 810, Catridge Canon warna 811, Binder Clip no. 155, Binder Clip no.111, Isi Staplas Besar, Isi Stlas Kecil.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya bahan cetak dan penggandaan berupa : kwitansi, undangan, buku kendali, lembaran disposisi, amplop Kop DPMD, Amplop Kop Gubernur dan Label Inventaris.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.9.450.000,- atau 94,50% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.550.000,-,Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 24 frekuensi iklan pada 3 jenis koran daerah.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya informasi kepada masyarakat.

h) Penyediaan Makanan dan Minuman.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.11.770.000,- dengan realisasi keuangan Rp.9.390.000,- atau 79,78% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.2.380.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya makan dan minum untuk tamu pimpinan dan makan minum lembur untuk pegawai selama 12 bulan.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat kedinasan.

i) Rapat-Rapat Koordinasi & konsultasi Keluar Daerah

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.115.615.000,- dengan realisasi keuangan Rp.100.023.600,- atau 86,51% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.15.591.400,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Pimpinan dan staf mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ke Pusat dan Luar Daerah lainnya sebanyak 7 kali

Hasil (Outcome) :

Sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

j) Rapat Koordinasi Teknis (Forum SKPD) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tingkat Provinsi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.219.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp.167.366.900,- atau 76,32% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.51.933.100,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Forum SKPD bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang diikuti oleh 45 orang aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota di Ambon.

Hasil (Outcome) :

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

k) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.722.939.600,- dengan realisasi keuangan Rp.708.560.000,- atau (98,01%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.14.379.600,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 20 orang tenaga administrasi dan teknis perkantoran dan 3 Orang Sopir.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

Tujuan program ini adalah Meningkatkan ketersediaan sarana & prasarana penunjang operasional perkantoran, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.1.025.000,- dengan realisasi keuangan 100% dan fisik 5%. Capaian kinerja kegiatan ini:

Keluaran (Output) :

Tersedianya 2930 lembar penggandaan administrasi kegiatan.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan.

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.27.550.000,- dengan realisasi keuangan Rp.21.940.000,- atau 79,64% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.5.610.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 2 unit laptop.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

- c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.160.640.000,- dengan realisasi keuangan Rp.147.615.795,- atau 91,89% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.13.024.205,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Terawatnya 3 unit kendaraan roda empat dan 9 unit kendaraan roda dua.
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa pakai kendaraan dinas/operasional.
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.28.765.000 atau 95,88% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.235.000. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Terawatnya 6 unit PC, 22 unit Notebook dan 8 unit AC.
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa pakai peralatan gedung kantor.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tujuan program ini adalah meningkatkan disiplin aparatur lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.150.000,- dengan realisasi keuangan 100% dan fisik 0%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya bahan cetak dan penggandaan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan.
Hasil (Outcome) :
Kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan.

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tujuan program ini adalah meningkatkan sinergitas capaian program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.11.129.800,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Keluaran (Output) :
Tersusunnya 3 laporan Capaian Kinerja OPD berupa LKIP, LPPD dan LKPJ Dinas PMD Provinsi Maluku.
- Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pelaporan kinerja pada Dinas PMD Provinsi Maluku.
- b) Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.44.515.500,- dengan realisasi keuangan Rp.43.176.300,- atau 96,99% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.339.200,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Keluaran (Output) :
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten SBT dan Maluku Tenggara.
- Hasil (Outcome) :
Meningkatnya sinergitas pelaksanaan program dan kelembagaan DPMD Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- 5) Program Bina Pemerintahan Desa
Tujuan program ini adalah meningkatkan kemandirian desa melalui tertib penataan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.54.580.550,- dengan realisasi keuangan Rp.51.460.850,- atau 94,28% dan fisik 19%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.3.119.700,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

3 orang aparatur melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan desa dan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan dasar perencanaan kegiatan di tahun berikutnya.

b) Koordinasi Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.109.150.000,- dengan realisasi keuangan Rp.102.284.400,- atau 93,71% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.6.865.600,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya dukungan berupa semen untuk pembangunan sarana prasarana lingkungan desa di Kab. Seram Bagian Barat - Kec. Seram Barat, Desa Piru- Dusun Hatumuli dan Desa Eti-Dusun Pulau Osi.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

c) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Barang Milik Desa/Asset Desa

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.166.400.000,- dengan realisasi keuangan Rp.158.479.400,- atau 95,24% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.7.920.600,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terselenggaranya bimtek keuangan desa yang diikuti oleh 50 orang aparatur Pemerintah kabupaten dan Desa di Kabupaten Maluku Tengah.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan tentang pengelolaan keuangan desa.

d) Fasilitasi dan Pembinaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kab/Kota

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.67.341.000,- dengan realisasi keuangan Rp.64.418.400,- atau 95,66% dan fisik 0%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.2.922.600,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

4 orang aparatur melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan dan Rencana Kegiatan untuk tahun berikutnya.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan dasar perencanaan kegiatan di tahun berikutnya.

e) Rapat Kerja Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.333.378.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

1500 orang dari 11 kabupaten/kota mengikuti rapat kerja teknis penyelenggaraan pemerintahan desa di Ambon.

Hasil (Outcome) :

Sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Maluku.

6) Program Bina Kelembagaan Desa dan Peningkatan Kapasitas

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian kelembagaan masyarakat desa dalam menjalankan fungsi dan partisipasi pembangunan di desa, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Fasilitasi Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat di Provinsi Maluku

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.73.444.000,- dengan realisasi keuangan Rp.63.343.600,- atau 86,25% dan fisik 50%, sisa anggaran adalah sebesar Rp.10.100.400,- Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

4 orang aparatur bersama Mitra melakukan koordinasi tentang pembobotan Ranperda di Ditjen BPD Kemendagri.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut perencanaan tahun berikutnya.

b) Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan PAUD Inisiasi 0 sampai 3 Tahun

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.147.465.500,- dengan realisasi keuangan Rp.138.681.000,- atau 94,04% dan fisik 100%. Sehingga sisa anggaran Rp.8.784.500,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya laporan perkembangan Kelompok Bermain/PAUD/TPA/TBM Binaan TP PKK.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas pendidikan di Maluku.

c) Pembinaan Kelompok Kerja Tim Pokjanal Posyandu

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.26.549.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Pokjanal Provinsi Maluku di Ambon.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kapasitas Tim Pokjanal Posyandu

d) Fasilitas Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi dan Nasional

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.39.900.000,- dengan realisasi keuangan Rp.38.216.100,- atau 95,78% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.683.900,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Perayaan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi 2020 di Ambon

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya integritas TP-PKK dalam menjalankan tugas dan fungsi.

e) Penguatan Kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.175.356.000,- dengan realisasi keuangan Rp.164.847.800,- atau 94,01% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.10.508.200,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Penguatan kapasitas SDM Aparatur Pemdes dan Anggota BPD sebanyak di Kabupaten SBT sebanyak 60 Orang.

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan BPD terkait tugas Pokok dan Fungsinya.

- f) **Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Konsultasi TP-PKK Provinsi Maluku**
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.124.255.000,- dengan realisasi keuangan Rp.111.455.200,- atau 89,70% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.12.799.800,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Tahun 2020 di Ambon.
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya Sinergitas program Tim Penggerak PKK di Provinsi Maluku
- g) **Penerapan Teknologi Tepat Guna Ikan Asar Cair dan Pemberian Alat Bantuan TTG**
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.73.140.000,- dengan realisasi keuangan Rp.69.031.200,- atau 94,38% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran Rp.4.108.800,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang diikuti 30 orang kader PKK di Kabupaten Bursel.
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kapasitas Kader PKK dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- h) **Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Desa**
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.70.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.68.116.000,- atau 95,55% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.884.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pembinaan kelembagaan desa di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru.
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pemahaman fungsi dan peran kelembagaan desa dalam pembangunan desa.
- i) **Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tingkat Kab/Kota**
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.235.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp.217.935.000,- atau 92,66% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.17.265.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya penilaian pelaksanaan 10 program pokok PKK di 11 desa pada 11 Kabupaten/kota di Provinsi Maluku. (Kota ambon kec. Sirimau negeri naku, Kab. Maluku Tengah kec. banda. Desa tanah rata, kab. Kab. SBB kec. Kairatu barat. Desa kamal, Kab. SBT kec.bula barat. Desa Hote, Kab. buru kec.namlea. Desa Jamilo, Kab. Bursel kec. Kepala madan. Desa wae hotong, Kab. Maluku Tenggara kec. Kei besar utama timur. Desa watlaar, kec. Kab. Kep Tanimbar Kormomolin desa meyano bab, Kab Kep Aru kec. aru tengah selatan. Desa wakua, Kab MBD kec. Letti desa batumia, Kota Tual kec. Pulau dulah utara. Desa tamedan)

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kualitas pelaksanaan program PKK di Maluku.

j) Fasilitasi Rapat Kerja Daerah Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Tahun 2020

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.50.260.000,- dengan realisasi keuangan Rp.45.878.000,- atau 91,28% dan fisik 10%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.884.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan oleh 1 orang Pegawai Dinas PMD dan 1 Orang Tim Penggerak PKK

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan dasar perencanaan kegiatan di tahun berikutnya.

k) Fasilitasi dan Pembinaan Jambore PKK provinsi Maluku

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.8.480.000,- dengan realisasi keuangan 100% dan fisik 3,5%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya administrasi penunjang kegiatan

Hasil (Outcome) :

Kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan.

l) Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Keluarga

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.444.480.000,- dengan realisasi keuangan Rp.416.466.341,- atau 93,70% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.28.013.659,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya Operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku selama 12 Bulan

Hasil (Outcome) :

Kelancaran operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku

m) Pembinaan PAUD Terintegrasi dan Sosialisasi Bina Keluarga Balita

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.22.555.000,- dengan realisasi keuangan Rp.17.771.100,- atau 78,79% dan fisik 15% Sehingga sisa anggaran sebesar Rp.4.783.900,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya koordinasi awal pelaksanaan kegiatan.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran persiapan pelaksanaan kegiatan dan dasar perencanaan kegiatan di tahun berikutnya.

n) Fasilitasi Pembinaan Pengolahan Pangan Lokal

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.309.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.295.748.000,- atau 95,71% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.13.252.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Pembinaan Pengolahan Pangan Lokal dan Penyerahan bantuan modal usaha bagi kelompok dasawisma di 11 Kabupaten/kota. (Kota ambon. Kec. Leitimur Selatan negeri naku, dasawisma pisang dan langsa, Kab. Maluku Tengah Kec saparua desa ilhamu dasawisma rambutan, desa Sirisori Islam dasawisma Putri Garuda, dan Kec. Banda desa tanah rata dasawisma Mawar 3, Kab. SBB Kec. Kairatu Barat desa kamal dasawisma kamal dan Kamboja, Kab. SBT Kec. Tutok tolu Desa kufar dasawisma kalasisin mutiara, kec. Bula Barat desa hote dasawisma wainarang, Kab. Buru Kec. Waelata desa waeleo dasawisma cempaka dan kec. Namlea desa sarleko dasawisma doa ibu, Kab. Buru Selatan kec. Kepala madan desa wae hotong dasawisma keltan tenaga indah dan kec. Fena fafan desa wae katin dasawisma lolik latet, Kota Tual kec Pulau Dulah Utara desa ohoi tel dasa wisma sejahtera dan desa ohoi fiditan dasawisma Anggrek, Kab. Malra kec. Pulau Pulau Aru desa kelurahan galaidubu dasawisma kartini dan desa keluraha siwalima dasawisma rar guamur, Kab. Tanimbar Kec. Nirunmas desa

tutukembong dasawisma seledri dan kec. Molu maru desa adodo molu dasawisma gingseng, dan Kab. MBD kec Leti desa Batumiau dasawisma aglone dan dasawisma angka)

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya Pemahaman terkait Pengolahan Pangan Lokal.

7) Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa

Tujuan program ini adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.82.380.000,- dengan realisasi keuangan Rp.76.271.400,- atau 92,58% dan fisik 28%, sehingga sisa anggaran adalah sebesar Rp.6.108.600,-, Capaian kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Keikutsertaan 5 orang pejabat pada rapat koordinasi dan persiapan pelaksanaan TTG Nasional Tahun 2020 di Jakarta.

Hasil (Outcome) :

Kesepakatan terkait penyelenggaraan TTG Nasional Tahun 2020

b) Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Provinsi Maluku

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.38.638.300,- dengan realisasi keuangan Rp.35.521.200,- atau 91,93% dan fisik 19%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.3.117.100,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya koordinasi awal persiapan pelaksanaan kegiatan oleh 2 Orang Pegawai Dinas PMD.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran persiapan pelaksanaan kegiatan dan dasa perencanaan kegiatan di tahun berikutnya.

- c) Fasilitas Pembinaan dan Pengendalian Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.69.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp.63.807.000,- atau 91,81% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.5.693.000,-.Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Keluaran (Output) :
Tersedianya laporan pembinaan pengelolaan air minum dan sanitasi kepada masyarakat di Kab. SBB, Kab. SBT, Kab. Buru, Kab. Bursel, Kab. Malteng.
- Hasil (Outcome) :
Tindak lanjut perencanaan pembinaan.
- d) Pengembangan Pengelolaan Produk unggulan di Desa Berkembang dan Mandiri
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.21.249.500,- dengan realisasi keuangan Rp.20.997.500,- atau 98,81% dan fisik 10%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.252.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Keluaran (Output) :
Terlaksananya koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan oleh 1 Orang Pegawai Dinas PMD
- Hasil (Outcome) :
Kelancaran pelaksanaan kegiatan
- e) Fasilitas Pembinaan Manajemen Pengelolaan Bumdes
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.114.636.000,- dengan realisasi keuangan Rp.97.332.000,- atau 84,91% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.17.304.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Keluaran (Output) :
Terlaksananya Pembinaan dan Penyerahan Bantuan Modal Stimulan bagi BUMDES di Kab. SBT, Kecamatan Bula, Desa Wailola.
- Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kualitas Manajemen Pengelolaan BUMDES.
- 8) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Tujuan program ini adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembangunan dan pengembangan Kawasan perdesaan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) **Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaaan**
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.188.347.100,- dengan realisasi keuangan Rp.170.851.700,- atau 90,71% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.17.495.400,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya laporan Pembinaan, Evaluasi, dan Monitoring Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Kab. Malteng, Kab. SBT, Kab. Buru, Kab. SBB, Kab. Tanimbar, Kab. Malra, Kab. Bursel, dan Kota Tual.
Hasil (Outcome) :
Umpan balik peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kawasan perdesaaan.
- b) **Pembinaan dan Penguatan Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaaan**
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.3.401.000,- dengan realisasi keuangan 100% dan fisik 5% Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya administrasi penunjang pelaksanaan kegiatan.
Hasil (Outcome) :
Kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan.
- c) **Rapat Koordinasi Kawasan Perdesaaan**
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.30.220.000,- dengan realisasi keuangan Rp.24.897.600,- atau 82,39% dan fisik 75%, sehingga sisa anggaran adalah sebesar Rp.5.322.400,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah:
Keluaran (Output) :
Terlaksananya koordinasi awal pelaksanaan kegiatan.
Hasil (Outcome) :
Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan dasar perencanaan kegiatan di tahun berikutnya.
- d) **Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDES Bersama**
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.6.296.000,- dengan realisasi keuangan 100% dan fisik 10%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya administrasi penunjang pelaksanaan kegiatan.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan.

e) Pelatihan Pengelolaan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.43.250.000,- dengan realisasi keuangan Rp.37.305.200,- atau 86,25% dan fisik 25%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.5.944.800,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya koordinasi awal pelaksanaan kegiatan.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan dasar perencanaan kegiatan di tahun berikutnya.

2.3. Identifikasi Permasalahan

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020 dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Sebagian besar Program dan Kegiatan yang dianggarkan pelaksanaannya pada tahun 2020 mengalami rasionalisasi anggaran sebesar 50% dari total pagu anggaran belanja langsung secara keseluruhan
2. Rata-rata kegiatan pada tahun 2020 hanya dapat terealisasi pada tahapan pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pandemik Covid-19 sehingga sebagian besar kegiatan-kegiatan inti berupa pertemuan/rapat/sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan berskala nasional dibatalkan pelaksanaannya.
3. Terkait keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang sampai sekarang belum memiliki gedung kantor defenitif yang representatif pasca terjadinya bencana alam gempa bumi pada bulan September 2019. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan fungsi dan tugas rutin OPD yang belum dapat berjalan maksimal.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.1.1. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 tahun seperti yang tertera pada Renstra OPD adalah :

- 1) Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat di desa melalui Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- 3) Meningkatkan pembangunan desa untuk mencapai dominasi status tipologi yang berkembang, maju dan mandiri.

Berdasarkan tujuan jangka menengah tersebut, maka Rencana Kerja Tahun 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Mendukung Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa/Kelurahan dan masyarakat melalui potensi dan sarana yang ada;
- 2) Mendukung terwujudnya pengembangan usaha ekonomi desa di sektor informal dengan mendayagunakan potensi ekonomi desa dan peningkatan Lembaga ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan ekonomi masyarakat desa ditengah Pandemic Covid 19 yang terjadi ;
- 3) Mendukung Terwujudnya pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan secara optimal dan Sumber daya desa melalui kerjasama antar desa;
- 4) Mendukung Terwujudnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- 5) Mendukung Terwujudnya peningkatan kompetensi aparatur yang berdaya guna dan berhasil guna melalui budaya kerja yang disiplin dan professional

3.1.2. Sasaran

Sasaran Pelaksanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022 antara lain :

- 1) Optimalisasi kapasitas SDM Aparatur Pemdes dan pelaku pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;
- 2) Optimalisasi kapasitas kelembagaan masyarakat desa;

- 3) Optimalisasi kapasitas lembaga ekonomi desa (BUMDes dan Bumdes Bersama), dan fasilitasi kelompok usaha ekonomi perdesaan
- 4) Optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan melalui kerjasama antar desa dalam pengembangan usaha sesuai potensi yang dimiliki kawasan perdesaan.

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Provinsi Maluku, maka pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi akan melaksanakan 5 program, 11 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan yang berada pada 2 prioritas daerah tahun 2022, termasuk rutin dengan rincian sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah;

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (2) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - (2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - (4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - (5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - (3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (4) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan ListrikSub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Penataan Desa

- a) Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat

3) Program Peningkatan Kerjasama Desa

- a) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan
 - (2) Sub Kegiatan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - (4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - (5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - (6) Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa

- (7) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa
- (8) Sub Kegiatan Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- a) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bid. Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - (4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - (5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - (6) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Terdapat 2 (Dua) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang masuk dalam usulan Program Prioritas yakni :

- 1) Prioritas I Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yaitu
 - a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - (1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bid. Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

- 2) Prioritas VII Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik yaitu
 - a. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku telah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kepmendagri 050-3708 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan kewenangan, tugas pokok Fungsi serta Struktur Organisasi sebagaimana tabel berikut :

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI MALUKU
GUGUS : GUGUS PULAU I s/d XII

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI			TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
			Kabupaten	Kecamatan	Desa					
01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8,414,484,025		10,074,565,415
	1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,947,922,355		4,145,318,473
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN selama 12 bulan	Kantor DPMD		12 Bulan		3,947,922,355		4,145,318,473
	1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,097,097,475		2,496,309,538
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kebutuhan kantor	Kantor DPMD		12 Bulan		19,277,475	12 Bulan	20,241,349
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya 2 jaringan telepon dan fax penunjang operasional kantor	Kantor DPMD		12 Bulan		91,350,000	12 Bulan	95,917,500
	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa angkut peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kantor DPMD		2 Unit		10,500,000	12 Bulan/ 2 Orang	11,025,000
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa 30 orang Tenaga Honororer pada Dinas PMD	Kantor DPMD		12 Bulan/ 30 Orang		975,970,000	12 Bulan/ 24 Orang	1,024,768,500
	1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,102,695,090		1,157,829,845
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan alat-alat kebersihan kantor	Kantor DPMD		54 Jenis		72,513,840	12 Bulan	76,139,532
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pendukung administrasi perkantoran	Kantor DPMD		12 Bulan		58,166,850	12 Bulan	61,075,193
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan pada 3 jenis koran daerah	Kantor DPMD		3 Jenis Koran Daerah / 12 Bulan		24,885,000	3 Jenis Koran Daerah / 12 Bulan	26,129,250
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu pimpinan	Kantor DPMD		240 Tamu Pimpinan / 12 Bulan		22,079,400	12 Bulan	23,183,370
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi pelaksanaan rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke Pusat dan daerah lain	Jakarta dan Kota Lainnya		20 Frekuensi		925,050,000	20 Frekuensi	971,302,500
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	SBB		1 Kegiatan/ 75 Orang			1 Kegiatan/ 75 Orang	
			Tersedianya data monev Program Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa	11 Kab/Kota		11 Kab/Kota			11 Kab/Kota	
	1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						795,083,750		834,837,938

			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya 2 Unit kendaraan roda 2 dan 2 Unit kendaraan roda 4 pada DPMD Provinsi Maluku	Kantor DPMD		4 Unit	650,000,000		2 Unit	682,500,000
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya 2 unit lemari arsip kantor pada DPMD Provinsi Maluku	Kantor DPMD		2 Unit	11,628,750		4 Unit	12,210,188
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya 12 unit peralatan gedung kantor pada DPMD Provinsi Maluku	Kantor DPMD		12 Unit	123,375,000		12 Unit	129,543,750
			05	Pengadaan Mebel	Tersedianya 12 unit kursi rapat kantor pada DPMD Provinsi Maluku	Kantor DPMD		12 Unit	10,080,000		12 Unit	10,584,000
		1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,092,940,500			1,147,587,525
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya 30 unit peralatan gedung kantor pada DPMD Provinsi Maluku	Kantor DPMD		30 unit/ 12 Bulan	104,485,500		30 unit/ 12 Bulan	109,709,775
			10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dan Rehab Kantor	Kantor DPMD		1 Paket	750,000,000		30 unit/ 12 Bulan	787,500,000
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya 20 Unit pada DPMD Provinsi Maluku	Kantor DPMD		20 Unit / 12 Bulan	238,455,000		20 Unit / 12 Bulan	250,377,750
		1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					237,800,000			249,690,000
			02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu bagi Aparatir Dinas PMD Provinsi Maluku	Kantor DPMD		68 Stel	37,800,000		68 Stel	39,690,000
			11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Dinas PMD Provinsi Maluku yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor DPMD		10 Orang	200,000,000		10 Org	210,000,000
		1	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					140,944,855			42,992,098
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kantor DPMD		1 Dokumen	100,000,000		7 Dokumen	105,000,000
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor DPMD		7 Dokumen	40,944,855		7 Dokumen	42,992,098
2				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
2	13			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA					131,250,000			137,812,500
2	13	02	1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat					131,250,000			137,812,500

2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Prov		40 Org	131,250,000		1 Laporan	137,812,500
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa di 11 Kab/Kota	11 Kab/Kota dan Jakarta		11 Kab/Kota			11 Kab/Kota	-
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1,677,500,000			1,761,375,000
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					1,677,500,000			1,761,375,000
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terseleenggaranya evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan pada 11 Kab/Kota	11 Kab/Kota dan Jakarta		3 Desa dan 3 Kelurahan	315,000,000		3 Desa dan 3 Kelurahan	330,750,000
2	13	04	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Terkoordinasikannya pelaksanaan Tentara membangun Desa di Provinsi Maluku	(lokasi dalam koordinasi dengan TNI selaku penyelenggara		3 kab/kota	136,500,000		3 kab/kota	143,325,000
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (05)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Ambon, KKT, Kep.Aru, MBD		60 Org / 2 Kab	136,500,000		60 Org / 2 Kab	143,325,000
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (06)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	Prov		60 Org / 11 Kab	185,000,000		60 Org / 11 Kab	194,250,000
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (07)	Jumlah Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan Pilkades Serentak	11 Kab/Kota		3 Kab/Kota / 1 Keg	131,250,000		3 Kab/Kota / 1 Keg	137,812,500
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa (02)	Jumlah Lokasi Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Kota Ambon, SBB, KKT, Tual, Buru, Aru, MBD		7 Kab/Kota	400,000,000		3 Kab/Kota	420,000,000
						Jumlah Lokasi Fasilitasi Penataan Desa dan Penegasan Batas Desa	Malteng, SBB, Buru, Bursel		4 Kab/Kota			3 Kab/Kota	
						Jumlah Peserta Rakemis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prov		200 Org/ 1 Keg			200 Org/ 1 Keg	
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Jumlah Dokumen Perda/Perbup/Perwali yang difasilitasi penyusunannya	Dinas PMD Provinsi		1 Kegiatan	173,250,000		1 Kegiatan	181,912,500

2	13	04	1.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa				60 Org / 1 Kab/Kota	200,000,000		120 Org / 2 Kab/Kota	210,000,000
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat						4,404,200,000			4,624,410,000
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bid. Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota						4,404,200,000			4,624,410,000
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (02)	Jumlah Kabupaten Lokasi Konvergensi Pencegahan Stunting	11 Kab/Kota			11 Kab/Kota	150,000,000		7 Kab/Kota	157,500,000
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (03)	Jumlah Peserta Pembinaan / Rakoor Tim Pokjantal Posyandu	Prov			30 Org / 1 Keg	250,000,000		30 Org / 1 Keg	262,500,000
						Jumlah Peserta dan Lokasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Bagi LKD	Kota Tual, SBB			60 Org / 2 Kab-Kota			90 Org / 3 Kab-Kota	
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya operasional Sekretariat TP PKK Provinsi Selama 12 Bulan	Set. TP PKK Provinsi Maluku			12 Bulan	2,718,450,000		12 Bulan	2,854,372,500
						Jumlah Desa Yang Terpilih sebagai Desa terbaik Pelaksana 10 Program Pokok PKK				3 desa / 11 Kab-Kota			3 desa / 11 Kab-Kota	
						Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Kerja TP PKK Provinsi Tingkat Nasional				150 Org / 1 kegiatan			150 Org / 1 kegiatan	
						Jumlah Pengurus PKK yang mengikuti Jambore Kader				15 Org / 1 Keg			15 Org / 1 Keg	
						Jumlah Peserta Peringatan HKG PKK Tingkat Provinsi dan Nasional				1 kegiatan			1 kegiatan	

						Jumlah Peserta Rapat Konsultasi TP. PKK Provinsi dan Tingkat Nasional				173 Org			173 Org	
						Terlaksananya Pelatihan Tumbuh Kembang Anak PAUD Terintegrasi Posyandu dan Sosialisasi Pendidikan Keluarga dan BKB (Bina Keluarga Balita)				3 Posyandu			3 Posyandu	
						Terselenggaranya operasional pada PAUD Inisiasi Binaan TP.PKK				12 Bln			12 Bln	
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (06)	Terikutkannya Provinsi Maluku Pada Gelar Teknologi Tingkat nasional	(dalam Koordinasi) - Luar Daerah			1 Kegiatan	315,000,000		1 Kegiatan	330,750,000
						Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan bantuan peralatan TTG	KKT, SBT, Kota Ambon,			2 Kelompok				
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (05)	Jumlah Lokasi Pembinaan Bumdes dan Pemberian Bantuan Stimulan Modal Usaha	SBB, Kota Tual, MBD			6 Bumdes / 3 Kab/Kota	850,000,000		7 Kabupaten	892,500,000
						Jumlah Kelompok Pengolahan Produk Unggulan Desa yang diberikan bantuan stimulan	Malra, KKT,			6 Kelompok / 3 Kab/Kota			5 Kabupaten	
						Jumlah Peserta/ Bumdesma Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Bersama pada Kab/Kota	KKT			40 Orang/ 2 Bumdesma/ 1 Kab			80 Orang/ 4 Bumdesma/ 2 Kab	
						Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	KKT			60 Orang/ 2 Kawasan Perdesaan			80 Org/ 4 Kawasan/ 2 Kab/Kota	
						Jumlah Lokasi Pembinaan Program TEKAD	Malteng, SBB, SBT			3 Lokasi			80 Org/ 4 Kawasan/ 2 Kab/Kota	

2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen data Pembinaan dan Pengendalian Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Bursel, SBB, Malra, Malteng, KKT, MBD, Buru, SBT, Aru		9 Kab	120,750,000		9 Kab	126,787,500
2	13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa					420,000,000			441,000,000
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					420,000,000			441,000,000
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kabupaten lokasi Pembinaan Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	11 Kab/Kota		11 Kabupaten	420,000,000		11 Kabupaten	441,000,000
						Jumlah Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana kawasan Perdesaan	KKT		1 Kabupaten/ 2 Kelompok			2 Kabupaten/ 4 Kelompok	
TOTAL										15,047,434,025			17,039,162,915

Ambon, April 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku

Ir. ISMAIL USEMAHU, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19650413 199303 1 009

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan. Untuk rencana tahun 2022 terdapat program/kegiatan sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku tahun 2022.

Demikian untuk dilaksanakan.

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI MALUKU**



Ir. ISMAIL USEMAHU, MT
Pembina Utama Madya
NIP 19650413 199303 1 009